

UPAYA PEMERINTAH KAMBOJA DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN MANUSIA DI KAMBOJA TAHUN 2022-2023

Oleh: Rizky Meliana Siagian
Pembimbing: Dr. Saiman, S.IP., M.Si.

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Perdagangan manusia menjadi permasalahan kompleks yang membutuhkan respons strategis pemerintah. Fenomena ini semakin krusial di Kamboja yang berperan sebagai negara asal, transit, dan tujuan. Studi ini menganalisis langkah kongkret pemerintah Kamboja pada skala nasional, bilateral, regional dan multilateral. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan analisis dokumen. Penelitian ini menggunakan teori kerja sama internasional dari K.J Holsti. Hasil penelitian ini menunjukkan komitmen Kamboja melalui penguatan kerangka hukum dan ratifikasi instrumen internasional (UNTOC, ILO, ACTIP) serta implikasi UU TSE dalam kerangka hukum nasional. Kamboja melakukan berbagai upaya domestik maupun internasional melalui kerja sama bilateral, regional dan multilateral. Namun, implementasi terkendala oleh kesenjangan kapasitas, koordinasi antar-lembaga dan korupsi sistematis sehingga dibutuhkan pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan struktural pemberantasan perdagangan manusia di Kamboja.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Kejahatan Transnasional, Kerja sama Internasional, Kepentingan Nasional.

ABSTRACT

Human trafficking is a complex issue that requires a strategic government response. This phenomenon is even more crucial in Cambodia, which acts as a country of origin, transit and destination. This study analyzes the Cambodian government's concrete steps at the national, bilateral, regional and multilateral scales. The research method is a descriptive qualitative approach based on document analysis. This research uses K.J Holsti's theory of international cooperation. The results of this study show Cambodia's commitment through strengthening the legal framework and ratification of international instruments (UNTOC, ILO, ACTIP) as well as the implications of the TSE Law in the national legal framework. Cambodia makes various domestic and international efforts through bilateral, regional and multilateral cooperation. However, implementation is constrained by capacity gaps, inter-agency coordination and systematic corruption, requiring an integrated and sustainable approach to address the structural problems of combating human trafficking in Cambodia.

Keywords: *Human Trafficking, Transnational Crime, International Cooperation, National Interest.*

A. PENDAHULUAN

Globalisasi telah memperluas ruang lingkup kejahatan, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga lintas batas negara (*transnational crime*). Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi perhatian utama adalah perdagangan manusia.¹ Menanggapi ancaman ini, PBB telah mengambil langkah konkret dengan mengadopsi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau yang juga dikenal sebagai Konvensi Palermo pada tahun 2000.² Protokol II Konvensi Palermo mendefinisikan perdagangan manusia sebagai :

*“shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation”.*³

Definisi ini menyoroti aspek utama *perdagangan manusia* yaitu tindakan ilegal yang bertujuan mengeksploitasi korban. Perdagangan manusia merupakan

tindak pidana yang diakui di bawah hukum internasional dan banyak praktik yang terkait dengan perdagangan manusia merupakan pelanggaran di bawah hukum hak asasi manusia internasional.⁴ Pada elaborasi data *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNDOC) dalam laporan global *Trafficking in Persons* tahun 2022 menunjukkan eksploitasi seksual (38.7%) dan kerja paksa (38.8%) menjadi bentuk perdagangan manusia yang paling dominan.⁵

Asia tenggara mengalami peningkatan kasus perdagangan manusia yang signifikan, dengan proporsi kasus yang dirujuk pemerintah meningkat 19% pada tahun 2023 dibandingkan 2022. Kamboja menjadi salah satu dari lima negara ASEAN dengan tingkat eksploitasi dan transit tertinggi dalam kasus perdagangan manusia. Kamboja juga menjadi negara asal dan negara tujuan utama perdagangan manusia di Asia Tenggara.⁶

Posisi geografis Kamboja yang berbatasan dengan Vietnam, Laos, Thailand dan kondisi perekonomian

¹ Kofi Annan, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*, United Nations Office on Drugs and Crime (New York, 2004).

² Elia Gagola, “Tindak Pidana Perdagangan manusia Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir Menurut UU No. 21 Tahun 2007,” *Lex Crimen VII*, no. 3 (2018): 6.

³ UNCATOC, “Definition of Trafficking: The Palermo Protocol,” PBB § (2000).

⁴ UN Human Rights, “Online Scam Operations and Trafficking Into Forced Criminality in Southeast Asia: Recommendations for a Human Rights Response,” *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Regional Office for South-East Asia*, 2023.

⁵ United Nations, *Global Report On Trafficking In Persons 2022* (New York: United Nations publication, 2022).

⁶ IOM, “IOM’S Regional Situation Report on Trafficking in Persons Into Forced Criminality in Online Scamming Centres in Southeast Asia,” 2024.

Kamboja yang masih berkembang dengan GDP Kamboja yaitu \$95.3 miliar pada tahun 2023 dengan populasi 17,06 juta jiwa menempatkan Kamboja dalam kasus perdagangan manusia. Selain itu, dominasi etnis Khmer dan agama Buddha lebih dari 95% penduduk berkontribusi pada perkembangan *perdagangan manusia*, terutama karena pemahaman Buddhis yang menekankan tanggung jawab perempuan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.⁷ Berdasarkan Report United States Institut of Peace (USIP) 2024, penggunaan teknologi digital oleh para pelaku kriminal menunjukkan tren lain dalam peningkatan perdagangan manusia.

Pemerintah Kerajaan Kamboja mengadopsi Undang-Undang tentang Penindasan perdagangan manusia dan Eksploitasi Seksual (UU TSE) dan diumumkan oleh Raja pada tanggal 15 Februari 2008 untuk melaksanakan kewajiban di bawah Protokol Palermo.⁸

Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan klasifikasi US Department of State melalui Trafficking Victims Protection Act (TVPA), Kamboja mengalami penurunan dari Tier 2 menjadi Tier 3 pada tahun 2022 dan tetap berada di posisi tersebut hingga 2023. Urgensi dari penelitian ini didasarkan pada report UN Departement Of State

pada tahun 2022-2023 yang menetapkan Kamboja ke dalam daftar hitam perdagangan manusia. Berdasarkan laporan TIP 2023 terdapat 88 kasus yang dilaporkan pemerintah dengan 925 korban pada tahun 2022.⁹ Kemudian tahun 2023, pemerintah merujuk 354 kasus dengan 356 korban pada laporan TIP 2024.¹⁰

Mengingat eskalasi kasus perdagangan manusia di Kamboja dalam tiga tahun terakhir dan implikasinya terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara, penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pemerintah Kamboja dalam menangani kejahatan transnasional perdagangan manusia pada tahun 2022-2023. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan terkini, mengisi kesenjangan literatur akademik, dan memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam upaya memerangi perdagangan manusia di tingkat nasional dan regional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menekankan pada pencarian makna dan pemahaman fenomena secara natural dan holistik. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk memahami makna yang berkaitan

⁷ Bela Putri Saraswati, "Upaya pemerintah Thailand Dalam Upaya Menangani Kasus Permasalahan perdagangan manusia Di Thailand," Universitas Lampung (Universitas Lampung, 2021).

⁸ cambodia government, "Law on Suppression of perdagangan manusia and Sexual Exploitation 2008," Anesvad § (2008).

⁹ U.S Department of State, "Trafficking of Persons Report 2023" (United States, 2023).

¹⁰ U.S Department of State, "Trafficking In Parsons Report 2024," Office to Monitor Combat Trafficking in Parsons, accessed September 16, 2024, <https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-civilian-security-democracy-and-human-rights/office-to-monitor-and-combat-trafficking-in-persons/>.

dengan fenomena sosial dengan menguraikan pertanyaan kompleks dan komprehensif dalam konteks yang diamati.¹¹

Teknik pengumpulan data menggunakan analisis dokumen (document analysis) terhadap catatan, surat, data statistik, buku, arsip, dan laporan situs resmi seperti laporan pemerintah, undang-undang, dan peraturan kebijakan. Analisis dokumen dipilih karena dapat memberikan latar belakang dan konteks penting untuk pemahaman kasus, terutama dalam penelitian yang melibatkan analisis kebijakan, implementasi dan dampaknya.¹²

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada peran Kamboja dalam menangani kejahatan transnasional perdagangan manusia periode 2022-2023, ketika Kamboja mengalami kemunduran ke Tier 3 dalam laporan perdagangan manusia U.S. Department of State, yang menunjukkan pemerintah tidak memenuhi standar minimum penanganan perdagangan manusia dan tidak melakukan upaya signifikan. Sedangkan dalam dimensi aktor, aktor yang akan diteliti adalah negara Kamboja.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perdagangan Manusia di Kamboja

Pemerintah Kamboja mendefinisikan perdagangan manusia melalui Undang-Undang Penindakan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual pada tahun

2008.¹³ Undang-undang ini tidak memberikan satu definisi yang komprehensif, tetapi berbagai pasal undang-undang tersebut menjelaskan perdagangan manusia dan kejahatan yang terkait dengan penyelundupan manusia. Definisi yang paling komprehensif terdapat pada pasal 13 undang-undang ini, yang menjelaskan bahwa penjualan manusia, pembelian atau pertukaran. Tindakan penyerahan seseorang secara melawan hukum kepada orang lain atau penerimaan, kendali atas seseorang dari orang lain dengan imbalan sesuatu yang berharga termasuk layanan dianggap sebagai perdagangan manusia. Undang-undang tersebut juga menyebutkan tentang penjualan lintas batas seseorang sebagai perdagangan manusia.

Perdagangan manusia di Kamboja telah berlangsung sejak rezim Khmer Merah (1975-1979) yang mengakibatkan genosida terhadap 2 juta jiwa atau 25% penduduk Kamboja. Setelah invasi Vietnam pada 1978 yang mengakhiri genosida, Kamboja terjebak dalam konflik politik berkepanjangan hingga ditandatanganinya *Paris Peace Agreement* pada 23 Oktober 1991 yang mengakhiri konflik tersebut.¹⁴ Setelah jatuhnya rezim Khmer Merah, Kamboja menghadapi peralihan menuju pemerintahan yang lebih stabil dan demokratik di bawah kepemimpinan Hun Sen. Namun, kendala ekonomi dan sosial yang

¹¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).

¹² Zainuddin Iba and Aditya Wardhana, *Metode Penelitian* (Perbalingga: Eureka Media Aksara, 2023).

¹³ Cambodia Government, *Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation* 2008.

¹⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Kementerian Pendidikan, *Bahan Pengajaran ASEAN Bagi Pendidikan Menengah* (Jakarta: Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat, 2021).

persisten, ditambah isu korupsi dan penegakan HAM yang lemah, telah membawa Kamboja pada permasalahan perdagangan manusia.¹⁵

Kamboja Sebagai Negara Asal, Transit, dan Tujuan

Kamboja memiliki peran ganda dalam peta perdagangan manusia dalam tingkat regional maupun global sebagai negara asal, transit, dan tujuan. Destinasi utama perdagangan manusia domestik provinsi-provinsi pedesaan seperti Kampong Cham, Prey Veng, Kandal, Takeo, dan Battambang menjadi sumber utama korban yang diperdagangkan ke destinasi domestik seperti Phnom Penh, Koh Kong, Sihanoukville, dan Siem Reap untuk eksploitasi seksual komersial, kerja paksa, dan mengemis paksa.¹⁶

Sebagai negara asal, perdagangan manusia dari Kamboja ke negara Thailand untuk dieksploitasi tenaga kerja dan industri perikanan. Vietnam menjadi tujuan perdagangan anak-anak untuk mengemis paksa. Malaysia menjadi destinasi untuk eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja, terutama pekerjaan pabrik dan konstruksi, dan pekerjaan rumah tangga.

Sebagai negara transit, Kamboja digunakan untuk memfasilitasi perdagangan warga Vietnam dan Tiongkok ke lokasi yang lebih jauh. Lemahnya pengawasan perbatasan dan kurangnya koordinasi antar lembaga memperparah situasi ini. Sebagai

negara tujuan, Kamboja menerima korban dari Vietnam, Tiongkok, dan Eropa Timur untuk eksploitasi seksual komersial.¹⁷ Kompleksitas peran ganda Kamboja ini mengharuskan adanya upaya koordinasi regional yang sistematis, penguatan kerangka hukum yang efektif.

Tren Perdagangan Manusia periode 2022-2023

Perkembangan teknologi telah mengubah modus operandi perdagangan manusia, terutama dalam perekrutan korban. Data 2019-2023 menunjukkan Facebook mendominasi platform perekrutan dengan 151 kasus, diikuti Snapchat (11 kasus) dan Instagram (6 kasus). Teknologi juga memengaruhi eksploitasi seksual anak, dengan pelaku menggunakan platform digital untuk membuat dan mendistribusikan materi pelecehan seksual anak (CSAM). Federal Human Trafficking Report (FHTR) mulai melacak situs web yang digunakan untuk mentransfer CSAM sebagai bagian dari skema perdagangan manusia pada 2023.¹⁸

Dalam aspek transportasi, kendaraan pribadi menjadi moda utama (75,38%) dalam kasus perdagangan seks 2023, diikuti layanan tumpangan dan pesawat (masing-masing 13,7%). Pelaku umumnya mengatur dan membiayai perjalanan korban, termasuk penerbitan dokumen perjalanan

¹⁵ Dian Fitriani Lestari, "Jatuhnya Rezim Khmer Merah Dan Kekuasaan Hun Sen di Kamboja Pasca Itu," Jurnal Ilmiah Indonesia 7 (2022): 1.

¹⁶ Eurica Natallie and Timbul Dompok, "Kamboja Sebagai Pusat Perdagangan Manusia Internasional," 2025, 3.

¹⁷ Denney Lisa and Henrik Alffram, *Addressing Exploitation of Labour Migrants in Southeast Asia: Beyond a Counter-Trafficking Criminal Justice Response*, ODI Thematic Brief 2 (Australia, 2023).

¹⁸ Lindsey Lane, "2023 Federal Human Trafficking Report," *Human Trafficking Institute*, 2024.

seperti visa turis.¹⁹ Tren ini menunjukkan evolusi perdagangan manusia yang memanfaatkan teknologi dan infrastruktur modern.

Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia di Kamboja termanifestasi dalam tiga bentuk utama. Pertama, pelacuran secara paksa yang mencakup 80% perdagangan perempuan, dengan korban direkrut melalui tawaran pekerjaan palsu dan manipulasi visa.²⁰ Kedua, kerja paksa yang mempengaruhi empat dari sepuluh pekerja migran di Kamboja, dengan Global Slavery Index 2023 memperkirakan 83.000 orang mengalami perbudakan modern. Anak-anak menjadi korban pekerja paksa di sektor pertanian, industri batu bata, dan jasa.²¹ Ketiga, perdagangan organ tubuh manusia yang meningkat pada 2022-2023, dengan ginjal sebagai organ paling banyak diperdagangkan melalui lima rumah sakit swasta di Phnom Penh dan Siem Reap.²²

¹⁹ IOM, "IOM'S Regional Situation Report on Trafficking in Persons Into Forced Criminality in Online Scamming Centres in Southeast Asia."

²⁰ Syamsuddin, "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban," *Sosio Informa* 6, no. 1 (2020): 21.

²¹ Walk Free, "Modern Slavery in Cambodia Global Slavery Index 2023 Country Snapshot" (Cambodia, 2023).

²² ICJR, "Kasus TPPO Penjualan Ginjal Di Kamboja: Perlu Peran Aktif Jaksa Sedari Awal Untuk Memastikan Penyidikan Kasus Tuntas Sampai Pelaku Intelektual Dan Hak Korban Diakomodir," Institute for Criminal Justice Reform, 2023, <https://icjr.or.id/kasus-tpo-penjualan-ginjal-di-Kamboja-perlu-peran-aktif-jaksa-sedari-awal-untuk-memastikan-penyidikan-kasus-tuntas-sampai-pelaku-intelektual-dan-hak-korban-diakomodir/>.

Faktor-Faktor Perdagangan Manusia di Kamboja

Lima faktor utama mendorong perdagangan manusia di Kamboja. Pertama, kondisi ekonomi dengan PDB per kapita hanya 2.330 USD (2022) dan 2.43K USD (2023) menciptakan tekanan ekonomi yang mendorong masyarakat mencari pekerjaan di luar negeri.²³ Kedua, lemahnya sistem hukum dalam aspek substantif, formal, dan penegakan hukum, termasuk kekurangan staf terlatih dan korupsi sistematis.²⁴

Ketiga, norma budaya dan ketidaksetaraan gender yang berakar pada budaya patriarki dan dominasi etnis Khmer-Buddha (95% penduduk) meningkatkan kerentanan perempuan terhadap eksploitasi. Hal ini dilatarbelakangi pemahaman Buddhis yang menekankan tanggung jawab perempuan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.²⁵

Keempat, migrasi tenaga kerja yang tidak teratur akibat kurangnya sistem formal yang transparan, diperparah oleh dampak COVID-19 Penutupan perbatasan internasional selama COVID-19 untuk menahan pandemi membuat

²³ World Bank, "Cambodia - GDP Per Capiacta," Website of the World Bank, 2023, [https://tradingeconomics.com/cambodia/gdp-per-capita-us-dollar-wb-data.html#:~:text=GDP per capita \(current US,compiled from officially recognized sources](https://tradingeconomics.com/cambodia/gdp-per-capita-us-dollar-wb-data.html#:~:text=GDP per capita (current US,compiled from officially recognized sources).

²⁴ Serli Defita et al., "Perbandingan Hukum Tindakan Pidana Perdagangan Orang Antara Indonesia Dengan Kamboja," *Jurnal Kritis Studi Hukum* 10, no. 2 (2025): 98.

²⁵ Todd Morrison and Vanntheary Lim, "You Have to Be Strong and Struggle": Stigmas As Determinants of Inequality for Female Survivors of Sex Trafficking in Cambodia, *Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence*, vol. 6, 2021.

pekerja migran lebih rentan dan membuat penyeberangan perbatasan menjadi ilegal.²⁶ Terdapat 50% siswa putus sekolah dan hanya 57% yang menyelesaikan sekolah menengah atas, meskipun partisipasi sekolah dasar mencapai 97%.²⁷

Instrumen Hukum Internasional yang Diratifikasi Kamboja

Kamboja telah meratifikasi United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Protokolnya pada tahun 2003, sebuah instrumen krusial untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Konvensi ini mengklasifikasikan perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional dengan tiga unsur utama yaitu tindakan, cara, dan tujuan eksploitatif seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, atau pengambilan organ. Meskipun fokusnya pada kontrol perbatasan (Pasal 11) kerap membuat korban dianggap sebagai imigran ilegal, perjanjian ini mewajibkan Kamboja untuk memerangi kejahatan terkait, seperti pencucian uang, dan memperkuat perlindungan bagi korban serta saksi.²⁸

Melengkapi upaya global tersebut, Kamboja juga terlibat dalam ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP), sebuah instrumen regional yang

mengadopsi standar UNTOC. ACTIP berfokus pada penegakan hukum terkoordinasi dan kolaborasi untuk melindungi korban di kawasan ASEAN. Sebagai perjanjian yang mengikat, konvensi ini mendorong Kamboja untuk memperkuat hukum domestik dan menyelaraskan praktiknya, termasuk melaporkan kemajuan yang dicapai.

Untuk perlindungan anak secara spesifik, Kamboja juga meratifikasi The ILO Convention On The Worst Forms Of Child Labor pada tahun 1999. Konvensi ini melarang empat kategori pekerjaan terburuk untuk anak di bawah 18 tahun, meliputi perbudakan modern, pekerja seks, perdagangan narkoba, serta pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan moral.²⁹

Di tingkat subregional, kerja sama juga terjalin melalui Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (COMMIT), sebuah forum untuk negara-negara Mekong Raya. Inisiatif ini mengadopsi definisi Protokol Perdagangan Manusia untuk memperkuat rencana aksi nasional dan mekanisme identifikasi korban. Meskipun demikian, implementasinya di Kamboja membatasi perlindungan pada perempuan dan anak-anak, membuat korban laki-laki kurang terlindungi. Ditambah lagi, COMMIT tidak lagi aktif sejak 2023, menyebabkan upaya penanganan perdagangan manusia di tingkat subregional mengalami stagnasi.³⁰

²⁶ Marika McAdam, "Vulnerability, Human Trafficking & COVID-19," *ASEAN-ACT* (Australia, 2020).

²⁷ Nurul Faqiriah, "Analisis Upaya Pemerintah Kamboja Dalam Menangani Perdagangan Manusia 2015-2020" (Universitas Islam Indonesia, 2022).

²⁸ Visal Nary Ponlok, "The Impact of Anti-Human Trafficking Laws on Lokal Communities in Cambodia : A Case Study of the Phnom Penh Region," *Studies in Law and Justice* 3, no. 3 (2024): 85.

²⁹ Michael J. Dennis, "The ILO Convention on the Worst Forms of Child Labor," *American Journal of International Law* 93, no. 4 (October 1999): 913.

³⁰ Foo Yen Ne, "Human Trafficking: In the Shadows of the Law," *NTS Insight*, no. IN18-06 (2018): 5.

Undang-Undang tentang Penindasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual (UU TSE) Kamboja

Untuk memperkuat kerangka hukum domestik di tengah tantangan implementasi instrumen internasional, Kamboja mengesahkan UU TSE pada 20 Desember 2007 kemudian disetujui oleh senat pada 18 Januari 2008. UU TSE merupakan tonggak penting sebagai respons terhadap kelemahan hukum sebelumnya. Tujuannya adalah menekan praktik perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, melindungi hak asasi manusia, serta mengimplementasikan konvensi internasional yang telah diratifikasi Kamboja.³¹

Dalam hal cakupan yuridiksi, UU TSE berlaku secara luas, baik di dalam wilayah Kamboja maupun secara ekstra-teritorial. Undang-undang ini mengatur pelanggaran yang terjadi di seluruh wilayah Kamboja, termasuk kapal dan pesawat berbendera negara tersebut. Selain itu, UU TSE menjangkau pelanggaran yang dilakukan warga negara Kamboja di luar negeri, serta kejahatan yang dilakukan warga negara asing jika korbannya adalah warga negara Kamboja.

Secara substansial, UU TSE mengatur berbagai bentuk tindak pidana, seperti pengiriman anak di bawah umur yang diancam hukuman 2 hingga 5 tahun, pengiriman orang lain untuk tujuan eksploitasi, serta praktik perekrutan ilegal, menjual, membeli, atau menukar manusia.³²

³¹ Cambodia Government.

³² Rebecca Nhep and Kate Van Doore, "The Legal Framework Of Orphanage Trafficking In Cambodia: Enhancing Identification,

Penerapan sanksi diatur secara fleksibel, di mana pengadilan dapat menjatuhkan hukuman penjara, denda, atau keduanya. Prinsip tindak pidana bersamaan juga diterapkan, dengan hukuman yang dijatuhkan secara proporsional. Pelanggaran yang bertujuan mencari keuntungan atau eksploitasi dapat dihukum penjara 7 hingga 15 tahun, sementara pidana lebih berat, yaitu 15 hingga 20 tahun, diberikan jika tujuannya adalah memindahkan korban ke luar negeri.³³ Selain aspek penegakan hukum, UU TSE juga memprioritaskan perlindungan korban dengan menjaga kerahasiaan identitas mereka dari media dan memberikan hak kepada korban untuk memperoleh kompensasi dari aset pelaku yang disita.

Kerangka Hukum Nasional Perdagangan Manusia di Kamboja

Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 1997 menjadi dasar pengaturan hubungan kerja. Perubahan pada tahun 2021 memperkuat kewenangan pengawas ketenagakerjaan sebagai "polisi peradilan" untuk menindak pelanggaran. Standar ini krusial dalam mencegah eksploitasi ekonomi, yang sering menjadi indikator kerja paksa.³⁴

Selanjutnya, perlindungan anak juga diatur melalui Cambodian National Council for Children (CNCC). Sejak 1995, CNCC bertugas mengoordinasikan lembaga-

Prosecution & Prevention" (Cambodia, 2021).

³³ BCN, "About Orphanage Trafficking: Description and Indicators Study: Cambodia" (Cambodia, 2023).

³⁴ Bipo Times, "Cambodia's Labour Law and Employment Regulations," *Biop Times* 76, no. December (2023): 3, www.biposervice.com.

lembaga terkait untuk melaksanakan kebijakan dan program kesejahteraan anak, termasuk pelaporan pelaksanaan Konvensi Hak Anak dan Rencana Aksi Nasional.³⁵

Di bidang migrasi dan imigrasi, Undang-Undang Imigrasi 1994 mengatur keberadaan orang asing dengan persyaratan ketat. Namun, ketentuan ini dapat meningkatkan kerentanan bagi individu tanpa dokumen sah, sehingga implementasinya perlu disertai mekanisme yang efektif untuk mengenali dan melindungi korban perdagangan manusia di antara para migran dan pengungsi.³⁶

Terakhir, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kamboja mengatur kejahatan terorganisir dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan sanksi berat, termasuk hukuman penjara hingga 30 tahun dan pembatasan hak sipil. Ketentuan ini relevan untuk mengatasi perdagangan manusia yang melibatkan kekerasan terstruktur, perbudakan modern dan memberikan efek jera bagi pelaku dan memperkuat upaya pencegahan.³⁷

Upaya Domestik Pemerintah Kamboja

Pemerintah Kamboja berfokus pada penguatan sistem identifikasi, perlindungan, dan pencegahan korban, yang didukung

oleh Rencana Strategis Nasional 2019-2023 dan 2024-2028. Kementerian Sosial, Veteran, dan Rehabilitasi Pemuda (MOSVY) berperan sentral dalam mengidentifikasi dan merehabilitasi korban, termasuk mendampingi 925 korban atau calon korban pada tahun 2022.³⁸ Pada tahun 2023, pemerintah berhasil menyelamatkan 123 anak dari eksploitasi dan mendirikan pusat akomodasi khusus di Poipet untuk korban yang dipulangkan dari luar negeri. Upaya MOSVY ini terintegrasi dengan kerangka perlindungan sosial nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan Kamboja 2030.³⁹

Dalam upaya pencegahan, Komite Nasional Penanggulangan Perdagangan manusia (NCCT) mengoordinasikan kampanye kesadaran dan edukasi yang telah menjangkau ratusan ribu masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan berkontribusi dengan mendistribusikan 25 set leaflet mengenai “Peningkatan Keselamatan bagi Pekerja Migran Perempuan” keseluruh departemen ibu kota dan provinsi pada tahun 2022. Kamboja juga proaktif menyebarkan lebih dari 200.000 pesan kesadaran anti perdagangan manusia melalui berbagai media dan acara publik.⁴⁰

Kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, seperti A21

³⁵ The Royal Government Of Cambodia, “Sub-Decree on the Establishment of the Cambodian National Council for Children” (Cambodia, 1995).

³⁶ UNHCR, “Cambodian: Law on Immigration of 1994,” Refworld Global Law and Police Database, 1994, <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1994/fr/15784>.

³⁷ Kingdom of Cambodia, “Criminal Code” (2011).

³⁸ Royal Government, “Report to the Secretary-General of the United Nations on Trafficking in Women and Girls,” *Ministry of Women’s Affairs* (Phnom Penh, 2024).

³⁹ MoSVY, “Strategic Plan On Sectorial Development Of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation 2019-2023” (Cambodia, 2018).

⁴⁰ U.S. Department of State, “Trafficking in Persons Report 2023,” *United States of America*, 2023.

Kamboja, memperluas jangkauan edukasi melalui berbagai platform. Pada tahun 2023, kampanye A21 menjangkau 129.890 orang secara langsung dan lebih dari 400.000 orang melalui media sosial dan kampanye digital, serta diperkirakan mencapai 2 juta penonton melalui saluran TV domestik. Peningkatan kapasitas juga terlihat dari 145 acara dan lokakarya pelatihan yang melibatkan 202 profesional dari berbagai sektor. Inovasi juga diluncurkan, seperti Child Advocacy Centre (CAC) pertama di Kamboja yang pada 2023 berhasil mengidentifikasi 102 korban, serta peluncuran chatbot anti-perdagangan manusia untuk pelaporan.⁴¹

Dari sisi penegakan hukum, Kamboja berhasil menindak 963 kasus, menangkap 1.258 tersangka, dan menyelamatkan 3.139 korban. Sistem peradilan telah menangani 1.616 kasus dengan 2.453 terdakwa, di mana 791 pelaku telah dijatuhi hukuman penjara. Dalam hal perlindungan, 5.579 korban telah direhabilitasi di pusat-pusat mitra dan 1.063 di antaranya telah diintegrasikan kembali ke dalam komunitas.⁴² Kamboja juga diakui sebagai negara juara dalam implementasi Pakta Global tentang Migrasi (GCM), yang menegaskan komitmennya terhadap standar internasional.

Kerja Sama Bilateral Pemerintah Kamboja dengan Thailand

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional

yang memerlukan kerja sama internasional komprehensif. Kamboja, sebagai negara asal, transit, dan tujuan perdagangan manusia, mengembangkan kerja sama bilateral strategis. Kamboja dan Thailand, yang berbagi perbatasan darat yang panjang, telah menandatangani MoU tentang pertukaran hak lalu lintas untuk transportasi lintas batas di Aranyaprathet-Poipet sebagai upaya pengawasan.⁴³ Pada Juli 2022, kedua negara menyepakati MoU tambahan untuk memberantas penipuan siber yang mencakup pertukaran keahlian teknis dan koordinasi investigasi.⁴⁴ Selanjutnya, pada Agustus 2022, mereka mengadopsi Standard Operating Procedures (SOP) untuk meningkatkan kolaborasi lintas batas dalam melindungi hak dan kepentingan korban.⁴⁵

Sebagai langkah untuk mempromosikan migrasi legal, pada Januari 2022, Kamboja dan Thailand sepakat mengurangi biaya visa bagi pekerja dari 2.000 THB menjadi 500

⁴³ Royal Government of Cambodia and Government of the Kingdom of Thailand, "MoU between the Royal Government of Cambodia and the Government of the Kingdom of Thailand On the Exchange of Traffic Rights for Cross Border Transport Through the Aranyaprathet-Poipet Border Crossing Points" (Cambodia, 2008).

⁴⁴ Mongkol Bangprapa, "Thai-Cambodian MoU on Suppression of Cyber Scams Approved," Bangkok Post, 2022, <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2340252/thai-cambodian-mou-on-suppression-of-cyber-scams-approved>.

⁴⁵ Risma Nur Afriyani, Agus Subagyo, and Anggun Dwi Panorama, "Peran Internasional Organization for Migration (IOM) Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Thailand Tahun 2021-2023," *Global Insight Journal* 1, no. 1 (2024): 9–11.

THB.⁴⁶ Selain itu, melalui MoU kerja sama tenaga kerja, kedua negara mengimplementasikan program peningkatan keterampilan bagi pekerja sebelum mereka berangkat dari Kamboja. Program ini bertujuan menyelaraskan keterampilan pekerja migran dengan kebutuhan pasar dan mengurangi kerentanan terhadap perdagangan manusia. Inisiatif ini dikoordinasikan oleh berbagai lembaga, termasuk Thailand Professional Qualifications Institute (TPQI) dan Kementerian Tenaga Kerja serta Pelatihan Kejuruan Kamboja.⁴⁷

Kerja Sama Kamboja-Tiongkok

Kerja sama Kamboja-Tiongkok berfokus pada penegakan hukum terhadap sindikat kejahatan transnasional. Pada September 2022, Kamboja meluncurkan penindakan tegas di Sihanoukville dan Phnom Penh, menargetkan sindikat Tiongkok yang terlibat dalam perjudian online ilegal dan perdagangan manusia. Operasi ini berhasil merazia dan menangkap lebih dari 1.000 tersangka, sebagai implementasi arahan Perdana Menteri Hun Sen setelah penangkapan gembong kejahatan She Zhijing.⁴⁸

Untuk memperkuat kolaborasi ini, Menteri Dalam Negeri Kamboja, Sar Sokha, mengunjungi Beijing pada September 2023. Kunjungan ini menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama dalam pelacakan dan

pemulangan pelaku, penguatan kapasitas aparat penegak hukum Kamboja, dan pertukaran informasi intelijen. Pada awal tahun 2023, kedua negara juga sepakat untuk menangani kemajuan hak asasi manusia dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan melawan politisasi isu hak asasi manusia. Di bawah Kantor Koordinasi dan Kerja Sama Penegakan Hukum Tiongkok-Kamboja, kedua negara juga memperkuat manajemen perbatasan untuk penanggulangan perjudian ilegal, perdagangan narkoba, dan perdagangan manusia melalui pertukaran informasi antar pejabat.⁴⁹

Sejak 2023 hingga pertengahan 2024, kedua pihak terus menyelidiki dan menindak berbagai kejahatan, termasuk kejahatan siber, perdagangan manusia, dan narkoba, melalui Kantor Koordinasi dan Kerja Sama Penegakan Hukum Tiongkok-Kamboja.⁵⁰ Tiongkok juga memberikan bantuan berkelanjutan berupa peralatan teknis dan pelatihan untuk sektor keamanan Kamboja.⁵¹

Kerja Sama Kamboja-Indonesia

Pada 22 Agustus 2023, Kepolisian Indonesia dan Kamboja menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Labuan Bajo untuk menanggulangi kejahatan transnasional.⁵² Implementasi kerja

⁴⁹ Firstyarinda Indraswari, "Rethinking Border Management: A Human Security Approach to Combating Human Trafficking in the Mekong Subregion," *JAS (Journal of ASEAN Studies)* 12, no. 2 (2024): 365.

⁵⁰ Kingdom Of Cambodia, "Joint Statement between the Kingdom of Cambodia and People's of China" (Cambodia, 2016).

⁵¹ Niam Chheng "Cambodia, China Sharpen Efforts to Suppress Transnational Crime," *Phnom Penh Post*, 2024.

⁵² Jurnal Mantik et al., "Indonesia's Strategy in ASEAN in Handling the Issues of Human

⁴⁶ IOM Thailand, "Iom Thailand Annual Report 2022," *IOM* (Thailand, 2022).

⁴⁷ IOM Thailand, "2023 Annual Report International Organization for Migration (IOM) Thailand" (Thailand, 2023).

⁴⁸ IPD, "Kamboja Menargetkan Penjudi Ilegal Dan Pelaku Perdagangan manusia," *Indo Pacific Dependence Forum*, 2022.

sama diperkuat melalui pertemuan KBRI Phnom Penh dengan Kepala Kepolisian Daerah Phnom Penh pada 4 September 2023 untuk meningkatkan kolaborasi antar-Polisi.⁵³

Pada 13 Maret 2024, Direktur Jenderal Imigrasi kedua negara bertemu untuk menjalin kerja sama strategis dalam delapan bidang. Kemitraan ini mencakup pertukaran informasi migrasi, pengaturan pergerakan orang yang sah, pencegahan penyelundupan dan perdagangan manusia, serta pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengurangi perdagangan manusia dan membina hubungan yang lebih harmonis di kedua negara.⁵⁴ Melalui kemitraan ini diharapkan dapat mengurangi perdagangan manusia di kedua negara dan membina hubungan yang lebih harmonis.

Kerja Sama Regional dan Multilateral Pemerintah Kamboja

Sebagai tindak lanjut dari posisi geografisnya yang strategis, Kamboja menjadikan kerja sama regional sebagai strategi nasional untuk memerangi perdagangan manusia, sebuah kejahatan transnasional yang rumit. Komitmen ini diimplementasikan melalui

keanggotaannya di ASEAN, khususnya melalui *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP). Berdasarkan ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime, Kamboja berpartisipasi aktif dalam harmonisasi kebijakan, pertukaran intelijen, serta operasi gabungan penegakan hukum.⁵⁵ Upaya ini tercermin dari berbagai proyek yang disetujui pada tahun 2022, termasuk kerja sama investigasi transnasional dan investigasi kejahatan siber yang dilakukan bersama Kepolisian Nasional Kamboja (CNP), serta program penuntutan yang berpusat pada korban yang dijalankan dengan Kementerian Kehakiman.⁵⁶

Pencapaian nyata Kamboja mencakup lokakarya peningkatan kapasitas bagi hakim dan jaksa, revisi pedoman identifikasi korban, dan pertemuan dengan Kepolisian Thailand untuk membahas penipuan daring dan perdagangan manusia. Selain kerja sama regional, Kamboja juga menunjukkan komitmennya melalui kerja sama multilateral. Negara ini secara aktif mengimplementasikan Protokol Palermo sebagai standar internasional untuk pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban perdagangan manusia. Koordinasi implementasi ini dilakukan oleh *National Committee for Counter Trafficking* (NCCT), yang menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar internasional

Trafficking in Cambodia,” *Online*) Mas Mansyur No.Kav, vol. 8, 2024.

⁵³ KBRI Phnom Penh, “Indonesia Akui Dan Hargai Upaya Pemerintah Kamboja Tangani Isu Perdagangan manusia,” KBRI Phnom Penh, 2023, <https://kemlu.go.id/phnompenh/id/news/27529/indonesiaakui-dan-hargai-upaya-pemerintah-kamboja-tangani-isu-perdagangan-orang>.

⁵⁴ Audi Aprilion and Andika Drajat Murdani, “The Role of the Indonesian Government in Mitigating Human Trafficking Cases through Social Media,” *Journal of International Relations* 4, no. 1 (July 24, 2024): 38.

⁵⁵ Nila Valerisella, Ninne Zahara Sliviani, and Ampuan Situmeang, “Cooperation Frameworks of Indonesia and Cambodia Against Transnational Organized Crime in Online Gambling Human Trafficking,” *Yustisia Tirtayasa* 5, no. 1 (2025): 16–17.

⁵⁶ ASEAN-ACT, “ASEAN-ACT Annual Progress 2022” (Australia, 2022).

melalui Rencana Strategis Nasional (2019-2023) yang berfokus pada pendekatan 3P (Prevention, Protection, dan Prosecution). Lebih lanjut, Kamboja menjadi partisipan kunci dalam Bali Process, bahkan menjadi negara pertama yang mengembangkan pedoman nasional tentang identifikasi korban dalam kerangka kerja ini.⁵⁷

Melalui forum ini, Kamboja memiliki kesempatan untuk bertukar pengalaman dan memperkuat kolaborasi dengan negara-negara lain, termasuk dalam implementasi Strategi Kerja Sama Adelaide 2023 yang berfokus pada delapan bidang strategis, seperti penegakan hukum, berbagi informasi, dan manajemen perbatasan.⁵⁸ Kedua bentuk kerja sama ini menjadi landasan penting bagi Kamboja dalam memperkuat responsnya terhadap kejahatan perdagangan manusia secara komprehensif.

Kerja Sama Kamboja dengan Organisasi Internasional

Pemerintah Kamboja secara aktif menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi internasional, terutama badan-badan PBB, untuk memperkuat kapasitasnya dalam menanggulangi perdagangan manusia. Organisasi-organisasi ini berperan sebagai mitra teknis utama yang menyediakan dukungan substansial. Contoh nyata dari kolaborasi ini adalah operasi gabungan yang berhasil menyelamatkan korban perdagangan

manusia dari kasino di perbatasan utara pada Oktober 2022.⁵⁹

Selain itu, International Organization for Migration (IOM) juga memainkan peran krusial dengan mengimplementasikan program COMMIT, yang didukung oleh pendanaan senilai \$100.000 USD, guna memperkuat mekanisme rujukan transnasional dan memfasilitasi pemulihan serta reintegrasi korban.⁶⁰

Selain IOM, Uni Eropa menjadi salah satu donor finansial utama, seperti yang dibuktikan dengan komitmen dana sebesar \$13 juta USD untuk implementasi program "Protect" pada tahun 2024.⁶¹

Secara lebih luas, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung Kamboja melalui berbagai inisiatif lintas batas, termasuk dalam kerangka ACMECS dan komisi perbatasan gabungan dengan negara tetangga.⁶² Kolaborasi ini sangat penting untuk mengatasi tantangan terkait hak asasi manusia

⁵⁹ Jack Brook, "EU, UN Reschedule Launch of Anti-Human Trafficking Project in Cambodia after Questions about Venue," World News, 2024,

<https://apnews.com/article/cambodia-eu-united-nations-human-trafficking-f3bc1437047530cfadbed770d35ed553>.

⁶⁰ IOM, "Standing Committee on Programmes and Finance," 2023.

⁶¹ Mario Pascal, "Proyek Baru Uni Eropa-PBB PROTECT Mendukung Pekerja Migran Perempuan Dan Anak-Anak Di Asia Tenggara," RRI, 2024, <https://www.rri.co.id/internasional/611130/proyek-baru-uni-eropa-pbb-protect-mendukung-pekerja-migran-perempuan-dan-anak-anak-di-asia-tenggara>.

⁶² UN Cambodia, "United Nations Sustainable Development Cooperation Framework for Cambodia 2024-2028," *United Nations Cambodia* (Cambodia, 2023).

⁵⁷ Australian Government, "The Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime 20 Year" (Australia, 2024).

⁵⁸ UNODC, "The Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime," 2023.

dan kejahatan terorganisasi lainnya, menegaskan komitmen Kamboja untuk memenuhi kewajiban perjanjian internasional.

Tantangan dalam Implementasi Upaya Penanggulangan

Meskipun Kamboja telah menunjukkan komitmen kuat melalui berbagai kerja sama regional dan multilateral, implementasi upaya penanggulangan perdagangan manusia masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Salah satu kendala utama adalah kesenjangan kapasitas dan sumber daya, di mana Kamboja masih membutuhkan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mitra pembangunan untuk mengatasi kekerasan terhadap pekerja migran dan sepenuhnya menerapkan kebijakan yang ada. Keterbatasan sumber daya ini mengakibatkan layanan sosial bagi korban menjadi sangat terbatas, membuat mereka rentan untuk kembali diperdagangkan.⁶³

Selain itu, koordinasi antar lembaga juga menjadi tantangan signifikan. Meskipun Laporan Perdagangan Manusia Kamboja 2023 menunjukkan upaya kolaboratif dari 22 kementerian, sistem koordinasi dinilai masih lemah karena adanya tumpang tindih tanggung jawab dan kurangnya sumber daya yang memadai di tingkat sub-nasional, yang secara langsung menghambat efektivitas penanggulangan.⁶⁴

Terakhir, korupsi menjadi hambatan serius, yang diperkuat oleh laporan Transparency International

yang menempatkan Kamboja pada posisi ke-150 dari 180 negara pada tahun 2023, menegaskan bahwa korupsi di kalangan elit tetap menjadi masalah utama.⁶⁵ Data ini selaras dengan laporan Departemen Luar Negeri AS (2023) yang menurunkan peringkat Kamboja dari tingkat kedua ke tingkat ketiga, dengan alasan bahwa korupsi endemik terus menghambat penegakan hukum dan perlindungan korban. Laporan tersebut secara spesifik menyoroti tidak adanya investigasi terhadap pejabat yang terlibat.⁶⁶

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kamboja telah menunjukkan komitmen kuat dalam menangani kasus perdagangan manusia melalui penguatan fondasi hukum dan jalinan kerja sama internasional. Komitmen ini diwujudkan dengan meratifikasi instrumen internasional seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Protokol Perdagangan Manusia, serta pembentukan National Committee for Counter Trafficking (NCCT) sebagai koordinator domestik. Di ranah internasional, Kamboja aktif menjalin kerja sama bilateral dengan negara-negara kunci seperti

⁶⁵ Transparency International, "Corruption Perceptions Index," Corruption Perceptions Index, 2025, <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/khm>.

⁶⁶ Indo-Pacific Defense FORUM, "Kamboja Menargetkan Penjudi Ilegal Dan Pelaku Perdagangan manusia," USINDOPACOM, 2022, <https://ipdefenseforum.com/id/2022/10/Kamboja-menargetkan-penjudi-ilegal-dan-pelaku-perdagangan-orang/>.

⁶³ Chab Dai, "Impact Report 2022," n.d.

⁶⁴ Aktualizováno, "Cambodia's Decade-Long Endeavor," Embassy of the Czech Republic in Phnom Penh, 2024, https://mzv.gov.cz/phnompenh/en/bilatera_l_relations/addressing_human_trafficking_cambodia_s.html.

Thailand, Tiongkok, dan Indonesia melalui Nota Kesepahaman (MoU). Kamboja juga berpartisipasi dalam kerangka regional seperti ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP), dan berkontribusi di forum multilateral seperti Bali Process, dengan dukungan dari organisasi internasional seperti IOM dan Uni Eropa. Meskipun demikian, efektivitas upaya-upaya ini masih dihadapkan pada tantangan signifikan, seperti kesenjangan kapasitas, koordinasi antar-lembaga yang lemah, dan korupsi sistemik yang terlihat dari peringkat rendahnya di Indeks Persepsi Korupsi. Dengan demikian, meskipun fondasi untuk memberantas perdagangan manusia sudah kuat, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan Kamboja untuk mengatasi tantangan operasional dan struktural ini secara terintegrasi dan berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- A21. "Cambodia Impact Report 2023." Cambodia, 2023.
- Afriyani, Risma Nur, Agus Subagyo, and Anggun Dwi Panorama. "Peran Internasional Organization for Migration (IOM) Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Thailand Tahun 2021-2023." *Global Insight Journal* 1, no. 1 (2024): 9–11.
- Aktualizováno. "Cambodia's Decade-Long Endeavor." Embassy of the Czech Republic in Phnom Penh, 2024. https://mzv.gov.cz/phnompenh/en/bilateral_relations/addressing_human_trafficking_cambodia_s.html.
- Annan, Kofi. *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*. United Nations Office on Drugs and Crime. New York, 2004.
- Aprilion, Audi, and Andika Drajat Murdani. "The Role of the Indonesian Government in Mitigating Human Trafficking Cases through Social Media." *Journal of International Relations* 4, no. 1 (July 24, 2024): 38.
- ASEAN-ACT. "ASEAN-ACT Annual Progress 2022." Australia, 2022.
- Australian Government. "The Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime 20 Years." Australia, 2024.
- BCN. "About Orphanage Trafficking: Description and Indicators Study: Cambodia." Cambodia, 2023.
- Bipo Times. "Cambodia's Labour Law and Employment Regulations." *Biop Times* 76, no. December (2023): 3. www.biposervice.com.
- Brook, Jack. "EU, UN Reschedule Launch of Anti-Human Trafficking Project in Cambodia after Questions about Venue." *World News*, 2024. <https://apnews.com/article/cambodia-eu-united-nations-human-trafficking-f3bc1437047530cfadbed770d35ed553>.
- Cambodia Government. *Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 2008*, Anesvad § (2008).
- Chab Dai. "Impact Report 2022," n.d.
- Defita, Serli, Vivi Agesti, Puja Sri Wilujeng, Andhea Fastika, and

- Levia Komala Sari. "Perbandingan Hukum Tindakan Pidana Peragangan Orang Antara Indonesia Dengan Kamboja." *Jurnal Kritis Studi Hukum* 10, no. 2 (2025): 98.
- Dennis, Michael J. "The ILO Convention on the Worst Forms of Child Labor." *American Journal of International Law* 93, no. 4 (October 1999): 913.
- Faqiriah, Nurul. "Analisis Upaya Pemerintah Kamboja Dalam Menangani Perdagangan Manusia 2015-2020." Universitas Islam Indonesia, 2022.
- FORUM, Indo-Pacific Defense. "Kamboja Menargetkan Penjudi Ilegal Dan Pelaku Perdagangan Orang." USINDOPACOM, 2022. <https://ipdefenseforum.com/id/2022/10/Kamboja-menargetkan-penjudi-ilegal-dan-pelaku-perdagangan-orang/>.
- Gagola, Elia. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir Menurut UU No. 21 Tahun 2007." *Lex Crimen* VII, no. 3 (2018): 6.
- Iba, Zainuddin, and Aditya Wardhana. *Metode Penelitian*. Perbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- ICJR. "Kasus TPPO Penjualan Ginjal Di Kamboja: Perlu Peran Aktif Jaksa Sedari Awal Untuk Memastikan Penyidikan Kasus Tuntas Sampai Pelaku Intelektual Dan Hak Korban Diakomodir." Institute for Criminal Justice Reform, 2023. <https://icjr.or.id/kasus-tpo-penjualan-ginjal-di-kamboja-perlu-peran-aktif-jaksa-sedari-awal-untuk-memastikan-penyidikan-kasus-tuntas-sampai-pelaku-intelektual-dan-hak-korban-diakomodir/>.
- Indraswari, Firstyarinda. "Rethinking Border Management: A Human Security Approach to Combating Human Trafficking in the Mekong Subregion." *JAS (Journal of ASEAN Studies)* 12, no. 2 (2024): 365.
- IOM. "IOM'S Regional Situation Report on Trafficking in Persons Into Forced Criminality in Online Scamming Centres in Southeast Asia," 2024.
- . "Standing Committee on Programmes and Finance," 2023.
- IOM Thailand. "2023 Annual Report International Organization for Migration (IOM) Thailand." Thailand, 2023.
- . "Iom Thailand Annual Report 2022." IOM. Thailand, 2022.
- IPD. "Kamboja Menargetkan Penjudi Ilegal Dan Pelaku Perdagangan Orang." Indo Pacific Dependence Forum, 2022.
- KBRI Phnom Penh. "Indonesia Akui Dan Hargai Upaya Pemerintah Kamboja Tangani Isu Perdagangan Orang." KBRI Phnom Penh, 2023. <https://kemlu.go.id/phnompenh/id/news/27529/indonesiaakui-dan-hargai-upaya-pemerintah-kamboja-tangani-isu-perdagangan-orang>.
- Kementerian Pendidikan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Bahan Pengajaran ASEAN Bagi Pendidikan Menengah*. Jakarta: Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, 2021.
- Kingdom of Cambodia. Criminal

- Code (2011).
Kingdom Of Cambodia. "Joint Statement between the Kingdom of Cambodia and People's of China." Cambodia, 2016.
- Lane, Lindsey. "2023 Federal Human Trafficking Report." *Human Trafficking Institute*, 2024.
- Lestari, Dian Fitriani. "Jatuhnya Rezim Khmer Merah Dan Kekuasaan Hun Sen Di Kamboja Pasca Itu." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 (2022): 1.
- Lisa, Denney, and Henrik Alffram. *Addressing Exploitation of Labour Migrants in Southeast Asia: Beyond a Counter-Trafficking Criminal Justice Response. ODI Thematic Brief* 2. Australia, 2023.
- Mantik, Jurnal, Hanny Warahhma, Surya Pratiwi, and Rudi Sukandar. "Indonesia's Strategy in ASEAN in Handling the Issues of Human Trafficking in Cambodia." *Online) Mas Mansyur No.Kav*. Vol. 8, 2024.
- McAdam, Marika. "Vulnerability, Human Trafficking & COVID-19." *ASEAN-ACT*. Australia, 2020.
- Mongkol Bangprapa. "Thai-Cambodian MoU on Suppression of Cyber Scams Approved." *Bangkok Post*, 2022.
<https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2340252/thai-cambodian-mou-on-suppression-of-cyber-scams-approved>.
- Morrison, Todd, and Vanntheary Lim. "*You Have to Be Strong and Struggle*": *Stigmas As Determinants of Inequality for Female Survivors of Sex Trafficking in Cambodia*. Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence. Vol. 6, 2021.
- MoSVY. "Strategic Plan On Sectorial Development Of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation 2019-2023." Cambodia, 2018.
- Natallie, Eurica, and Timbul Dompok. "Kamboja Sebagai Pusat Perdagangan Manusia Internasional," 2025, 3.
- Ne, Foo Yen. "Human Trafficking: In the Shadows of the Law." *NTS Insight*, no. IN18-06 (2018): 5.
- Nhep, Rebecca, and Kate Van Doore. "The Legal Framework Of Orphanage Trafficking In Cambodia: Enhancing Identification, Prosecution & Prevention." Cambodia, 2021.
- Pascal, Mario. "Proyek Baru Uni Eropa-PBB PROTECT Mendukung Pekerja Migran Perempuan Dan Anak-Anak Di Asia Tenggara." RRI, 2024.
<https://www.rri.co.id/internasional/611130/proyek-baru-uni-eropa-pbb-protect-mendukung-pekerja-migran-perempuan-dan-anak-anak-di-asia-tenggara>.
- Phnom Penh Post. "Cambodia, China Sharpen Efforts to Suppress Transnational Crime," 2024.
- Ponlok, Visal Nary. "The Impact of Anti-Human Trafficking Laws on Local Communities in Cambodia : A Case Study of the Phnom Penh Region." *Studies in Law and Justice* 3, no. 3 (2024): 85.
- Royal Government. "Report to the Secretary-General of the United Nations on Trafficking in Women and Girls." *Ministry of Women's Affairs*. Phnom Penh,

- 2024.
- Royal Government of Cambodia, and Government of the Kingdom of Thailand. “MoU between the Royal Government of Cambodia and the Government of the Kingdom of Thailand On the Exchange of Traffic Rights for Cross Border Transport Through the Aranyaprathet-Poipet Border Crossing Points.” Cambodia, 2008.
- Saraswati, Bela Putri. “Peran Pemerintah Thailand Dalam Upaya Menangani Kasus Permasalahan Perdagangan Manusia Di Thailand.” *Universitas Lampung*. Universitas Lampung, 2021.
- Syamsuddin. “Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban.” *Sosio Informa* 6, no. 1 (2020): 21.
- The Royal Government Of Cambodia. “Sub-Decree on the Establishment of the Cambodian National Council for Children.” Cambodia, 1995.
- Transparency International. “Corruption Perceptions Index.” *Corruption Perceptions Index*, 2025.
<https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/khm>.
- U.S. Department of State. “Trafficking in Persons Report 2023.” *United States of America*, 2023.
- U.S. Department of State. “Trafficking In Parsons Report 2024.” Office to Monitor Combat Trafficking in Parsons. Accessed September 16, 2024.
<https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-civilian-security-democracy-and-human-rights/office-to-monitor-and-combat-trafficking-in-persons/>.
- . “Trafficking of Persons Report 2023.” United States, 2023.
- UN Cambodia. “United Nations Sustainable Development Cooperation Framework for Cambodia 2024-2028.” *United Nations Cambodia*. Cambodia, 2023.
- UN Human Rights. “Online Scam Operations and Trafficking Into Forced Criminality in Southeast Asia: Recommendations for a Human Rights Response.” *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Regional Office for South-East Asia*, 2023.
- UN Human Rights Council. “National Report Submitted Pursuant to Human Rights Council Resolutions 5/1 and 16/21.” *United Nations Human Rights Council*. Cambodia, 2024.
- United Nations. *Global Report On Trafficking In Persons 2022*. New York: United Nations publication, 2022.
- UNCATOC. Definition of Trafficking: The Palermo Protocol, PBB § (2000).
- UNHCR. “Cambodian: Lawon Immigration of 1994.” Refworld Global Law and Police Database, 1944.
<https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1994/fr/15784>.
- UNODC. “The Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime,” 2023.
- Valerisella, Nila, Ninne Zahara Sliviani, and Ampuan

- Situmeang. "Cooperation Frameworks of Indonesia and Cambodia Against Transnational Organized Crime in Online Gambling Human Trafficking." *Yustisia Tirtayasa* 5, no. 1 (2025): 16–17.
- Walk Free. "Modern Slavery in Cambodia Global Slavery Index 2023 Country Snapshot." Cambodia, 2023.
- World Bank. "Cambodia - GDP Per Capiacta." Website of the World Bank, 2023. [https://tradingeconomics.com/cambodia/gdp-per-capita-us-dollar-wb-data.html#:~:text=GDP per capita \(current US,compiled from officially recognized sources](https://tradingeconomics.com/cambodia/gdp-per-capita-us-dollar-wb-data.html#:~:text=GDP per capita (current US,compiled from officially recognized sources).
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.